

**BALAI PENGAMANAN
ALAT DAN FASILITAS
KESEHATAN SURABAYA**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, 06 Mei 2026
Kepala BPAFK Surabaya



Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM
NIP 197201301992031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	61
F. Pengungkapan Penting Lainnya	64
VI. Lampiran dan Daftar	

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

*JL. KARANGMENJANGAN NO. 22 SURABAYA JAWA TIMUR
TELEPON 031 5035830,5014638, FAXIMILE 0315021002*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 06 Mei 2026
Kepala BPAFK Surabaya



Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM
NIP 197201301992031002

Laporan Keuangan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 19.939.424.538 atau mencapai 128,64 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 15.500.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 23.472.198.008 atau mencapai 63,71 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 36.841.620.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun anggaran 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.710.673.551 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.020.169.774; Aset Tetap (neto) sebesar Rp28.532.784.216; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp157.719.561. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp138.193.027 dan Rp29.572.480.524.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.214.891.489, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp24.942.640.112 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp4.727.748.623). Surplus Kegiatan Non Operasional

dan Surplus/(Defisit) Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp7.321.049 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp4.720.427.574).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 30.760.134.628 defisit-LO sebesar (Rp4.720.427.574) ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 3.532.773.470 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp29.572.480.524.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.500.000.000	19.939.424.538	(4.439.424.538)	128,64	15.000.000.000	20.101.830.562	(5.101.830.562)	134,01
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	15.500.000.000	19.939.424.538	(4.439.424.538)	128,64	15.000.000.000	20.101.830.562	(5.101.830.562)	134,01
III. Pendapatan Hibah	-	-	-	0	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	15.500.000.000	19.939.424.538	(4.439.424.538)	128,64	15.000.000.000	20.101.830.562	(5.101.830.562)	134,01
B. Belanja Negara	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Belanja Pemerintah Pusat	36.841.620.000	23.472.198.008	(13.369.421.992)	63,71	31.748.430.000	28.582.930.862	(3.165.499.138)	90,03
1. Belanja Pegawai	12.305.593.000	12.119.025.183	(186.567.817)	98,48	12.511.005.000	11.973.780.406	(537.224.594)	95,71
2. Belanja Barang	14.635.219.000	6.490.003.528	(8.145.215.472)	44,35	14.831.562.000	12.264.884.025	(2.566.677.975)	82,69
3. Belanja Modal	9.900.808.000	4.863.169.297	(5.037.638.703)	49,12	4.405.863.000	4.344.266.431	(61.596.569)	98,60
II. Transfer ke Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	36.841.620.000	23.472.198.008	(13.369.421.992)	63,71	31.748.430.000	28.582.930.862	(3.165.499.138)	90,03

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA NERACA 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	0,00
Piutang Bukan Pajak	409.931.000	127.143.000	282.788.000	222,42
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(49.834.530)	(127.143.000)	77.308.470	(60,80)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	360.096.470	-	360.096.470	0,00
Persediaan	660.073.304	672.197.131	(12.123.827)	(1,80)
JUMLAH ASET LANCAR	1.020.169.774	672.197.131	347.972.643	51,77
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	102.124.046.234	97.260.876.937	4.863.169.297	5,00
Gedung dan Bangunan	10.113.788.525	10.113.788.525	-	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.500.000	67.500.000	-	0,00
Aset Tetap Lainnya	277.103.703	277.103.703	-	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(84.049.654.246)	(77.640.339.900)	(6.409.314.346)	8,26
JUMLAH ASET TETAP	28.532.784.216	30.078.929.265	(1.546.145.049)	(5,14)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	820.490.099	820.490.099	-	0,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	99.883.154	91.530.000	8.353.154	9,13
Aset Lain-lain	930.626.120	930.626.120	-	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1.693.279.812)	(1.693.279.812)	-	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	157.719.561	149.366.407	8.353.154	5,59
JUMLAH ASET	29.710.673.551	30.900.492.803	(1.189.819.252)	(3,85)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	138.193.027	140.358.175	(2.165.148)	(1,54)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	138.193.027	140.358.175	(2.165.148)	(1,54)
JUMLAH KEWAJIBAN	138.193.027	140.358.175	(2.165.148)	(1,54)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	29.572.480.524	30.760.134.628	(1.187.654.104)	(3,86)
JUMLAH EKUITAS	29.572.480.524	30.760.134.628	(1.187.654.104)	(3,86)
JUMLAH EKUITAS	29.572.480.524	30.760.134.628	(1.187.654.104)	(3,86)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	29.710.673.551	30.900.492.803	(1.189.819.252)	(3,85)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	-	-	-	0,000
PENDAPATAN OPERASIONAL	-	-	-	0,000
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	-	-	-	0,000
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	20.214.891.489	19.410.289.263	804.602.226	4,145
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	20.214.891.489	19.410.289.263	804.602.226	4,145
Jumlah Pendapatan	20.214.891.489	19.410.289.263	804.602.226	4,145
BEBAN OPERASIONAL	-	-	-	0,000
Beban Pegawai	12.119.025.183	11.973.780.406	145.244.777	1,213
Beban Persediaan	358.212.853	836.675.814	(478.462.961)	(57,186)
Beban Barang dan Jasa	3.131.342.444	4.451.612.434	(1.320.269.990)	(29,658)
Beban Pemeliharaan	1.536.239.732	2.261.783.420	(725.543.688)	(32,078)
Beban Perjalanan Dinas	1.465.814.024	4.851.940.726	(3.386.126.702)	(69,789)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.409.314.346	6.482.277.989	(72.963.643)	(1,126)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(77.308.470)	(664.353.500)	587.045.030	(88,363)
JUMLAH BEBAN	24.942.640.112	30.193.717.289	(5.251.077.177)	(17,391)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4.727.748.623)	(10.783.428.026)	6.055.679.403	(56,157)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	0,000
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	-	(599.772.000)	599.772.000	(100,000)
Pendapatan Pelepasan Aset	-	-	-	0,000
Beban Pelepasan Aset	-	599.772.000	(599.772.000)	(100,000)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	0,000
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	0,000
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	0,000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.321.049	27.187.799	(19.866.750)	(73,072)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.321.049	27.187.799	(19.866.750)	(73,072)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	0,000
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.321.049	(572.584.201)	579.905.250	(101,279)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4.720.427.574)	(11.356.012.227)	6.635.584.653	(58,432)
POS LUAR BIASA	-	-	-	0,000
Beban Luar Biasa	-	-	-	0,000
POS LUAR BIASA	-	-	-	0,000
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4.720.427.574)	(11.356.012.227)	6.635.584.653	(58,432)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	30.760.134.628	-	30.760.134.628	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.720.427.574)	(11.356.012.227)	6.635.584.653	(58,43)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3.532.773.470	42.116.146.855	(38.583.373.385)	(91,61)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.187.654.104)	30.760.134.628	(31.947.788.732)	(103,86)
EKUITAS AKHIR	29.572.480.524	30.760.134.628	(1.187.654.104)	(3,86)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya sebagai satuan kerja dibawah Eselon 1 Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI mempunyai

1. VISI BPAFK Surabaya

“Menjadi Lembaga Pengamanan Fasilitas Kesehatan Berstandar Internasional”

2. MISI BPAFK Surabaya

1. Menyediakan layanan yang bermutu , terpercaya dan inovatif dalam bidang inspeksi, pengujian, kalibrasi dan sertifikat fasilitas kesehatan;
2. Mewujudkan fasilitas kesehatan yang aman;
3. Menjamin mutu dan penapisan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan;
4. Memperkuat kemitraan dalam pengelolaan mutu alat kesehatan di tingkat regional.

3. TUJUAN BPAFK Surabaya

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan penggunaan alat kesehatan Radiasi dan Non Radiasi
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Meningkatkan pengelolaan yang mandiri, akuntabel dan independen.

4. SASARAN STRATEGIS BPAFK Surabaya

- a. Tercapainya pelayanan prima, cepat, tepat dan akurat dan ramah serta pola tariff yang menarik.
- b. Tercapainya target pelayanan di bidang pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana serta monitoring radiasi perorangan.
- c. Tercapainya peningkatan cakupan wilayah dan kecepatan pelayanan.
- d. Tercapainya pengamanan peralatan kesehatan pre market.
- e. Terselenggaranya jejaring rujukan regional, nasional dan internasional.
- f. Tercapainya keamanan dan keselamatan penggunaan alat kesehatan Radiasi dan Non radiasi di sarpelkes.
- g. Terselenggaranya program inti manajemen.
- h. Terciptanya produk pelayanan yang bermutu dengan biaya terjangkau dan kompetitif.
- i. Terwujudnya akuntabilitas wajar tanpa pengecualian.
- j. Tercapainya penilaian yang obyektif terkait mutu dan keamanan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan.

5. STRATEGI MENCAPAI SASARAN STRATEGIS BPAFK Surabaya

- a. Pelayanan prima
- b. Peningkatan utilisasi sarana prasarana dan peralatan pengujian dan kalibrasi
- c. Inovasi, serta diferensiasi dan diversifikasi layanan.

- d. Peningkatan peran jejaring laboratorium.
- e. Pembinaan proaktif ke seluruh stake holder di wilayah binaan.
- f. Penyelenggaraan manajemen SDM yang professional.
- g. Sistem informasi elektronik
- h. Kemandirian dan akuntabilitas organisasi dalam melaksanakan operasional pelayanan melalui BLU.
- i. Independensi organisasi dalam melaksanakan operasional pelayanannya.

6. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPAFK Surabaya

1. Tugas Pokok :

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan telah diubah menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta.

2. Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
- d. kalibrasi alat ukur standar;
- e. pengujian produk perbekalan kesehatan rumah tangga;
- f. pengamanan radiasi dan pengukuran luaran radiasi;
- g. inspeksi sarana produksi, sarana distribusi, dan

- sarana pengujian alat kesehatan;
- h. inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga;
- i. inspeksi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;
- j. pengendalian mutu layanan pengujian alat dan fasilitas kesehatan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis;
- l. pelaksanaan kerja sama;
- m. pengelolaan data dan informasi;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang PAFK.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak

yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh

tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih

tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga

(kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Adanya kebijakan efisiensi (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025) menyebabkan sebagian anggaran terblokir dan terjadi revisi beberapa kali sebagai berikut:

- 1.Revisi Blokir anggaran sebesar Rp. 14.245.983.000,-
- 2.Penambahan pagu belanja operasional sebesar Rp. 634.190.000,- pada Program Dukungan Manajemen;
- 3.Adanya penambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai sebesar Rp. 2.137.941.000,- pada Program Dukungan Manajemen;
- 4.Realokasi blokir Belanja Modal Pengadaan Alat Sumber Dana Rupiah Murni sebesar Rp. 1.107.720.000,- ke anggaran Kantor Pusat Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi dalam rangka pemenuhan anggaran vaksin imunisasi.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	15.500.000.000	15.500.000.000
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	15.500.000.000	15.500.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	10.120.402.000	12.305.593.000
Belanja Barang	14.048.279.000	14.635.219.000
Belanja Modal	11.008.528.000	9.900.808.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	35.177.209.000	36.841.620.000

Realisasi

Pendapatan

Rp19.939.424.538

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 19.939.424.538 atau mencapai 128,64 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 15.500.000.000. Pendapatan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya terdiri dari :

1. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan standardisasi di Bidang Kesehatan sebesar Rp19.865.684.600,-
2. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp12.900.000,-
3. Realisasi Pendapatan Anggaran Lain-lain tercatat sebesar Rp33.118.269,-. Munculnya akun Pendapatan Lain-lain pada Tahun Anggaran 2025 ini disebabkan oleh adanya koreksi akun atas pengembalian belanja pegawai tahun berjalan. Kronologi dapat disampaikan sebagai berikut:
 - Pada TA 2025, di BPAFK Surabaya terdapat pegawai yang pensiun dini terhitung mulai 1 Juni 2025, namun SK Pensiun tersebut baru diterima pada bulan September 2025.
 - Akibat keterlambatan administrasi tersebut, gaji tetap terbayarkan hingga September 2025 dan Tunjangan Kinerja terbayarkan hingga Agustus 2025.
 - Satker telah melakukan penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran belanja tersebut ke Kas Negara menggunakan akun belanja (51xxxx). Komponen yang disetor meliputi: Gaji bulan Juli s.d. September 2025, Tunjangan Kinerja bulan Juli s.d. Agustus 2025, serta Gaji ke-13 dan Tunjangan Kinerja ke-13.

- Berdasarkan hasil koordinasi dengan KPPN, diketahui bahwa Gaji ke-13 dan Tunjangan Kinerja ke-13 tidak termasuk dalam komponen yang disetorkan ke Kas Negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses penarikan kembali (restitusi) atas kelebihan setoran tersebut agar dapat diproses pengembalian belanja kembali sesuai perhitungan yang benar.
 - Untuk menarik kembali setoran yang salah (kelebihan setor), satker membuat SPM PP (Pengembalian Pendapatan) dengan jenis 421, tetapi akun belanja (51xxxx) tidak ditemukan pada saat pembuatan SPM PP tersebut. Oleh karena itu satker mengajukan Koreksi Transaksi/Data untuk merubah setoran yang semula menggunakan akun belanja (51xxxx) menjadi akun Pendapatan Lain-lain (425999) ke KPPN.
4. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp 50.418.889,-. Pendapatan ini terdiri dari :
- a. Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Label Pengujian dan Kalibrasi TA 2025 dari PT Cahaya Mandiri sebesar Rp 985.888,-;
 - b. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan Spark Ignition (Alat Pengujian dan Kalibrasi) dari PT Besha Analitica sebesar Rp 16.108.539,-;
 - c. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan Hydraulic Pressure Testing dari PT Besha Analitica sebesar Rp 14.996.890,-;
 - d. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan IPX1-6 Waterproof Test Chamber (Alat Pengujian dan Kalibrasi) dari PT Besha Analitica sebesar Rp 18.327.572.
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran

Yang Lalu sebesar Rp 4.560.000,-. Penerimaan ini adalah Pengembalian kelebihan pembayaran transport kegiatan dalam kabupaten/kota dan biaya paket meeting fullday (hasil audit kinerja Irjen Kemenkes pada BPAFK Surabaya TA 2023 s.d 2024)

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp2.761.049,-. Penerimaan tersebut terdiri dari :
 - a.Pengembalian Kelebihan Uang Makan PNS Bulan Desember 2024 sebesar Rp 2.171.050,-
 - b.Pengembalian Kelebihan Uang Makan PPPK Bulan Desember 2024 sebesar Rp 492.100,-
 - c. Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja PNS Bulan Desember 2024 sebesar Rp 97.899,-

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
TA 2025*

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN 2025		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan standardisasi di Bidang Kesehatan	15.500.000.000	19.865.684.600	128,17
2	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	16.900.000	0,00
3	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	33.118.269	0,00
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	50.418.889	0,00
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	4.560.000	0,00
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.761.049	0,00
Jumlah		15.500.000.000	19.973.442.807	128,86

Realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran (TA) 2025 mengalami penurunan sebesar 0,64% dibandingkan TA 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya volume alat serta sarana dan prasarana (sarpras) yang diajukan oleh pengguna layanan untuk diuji, dikalibrasi, atau diinspeksi sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2025 dan TA 2024*

NO	URAIAN	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan standardisasi di Bidang Kesehatan	19.865.684.600	20.036.393.810	(0,85)
2	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	16.900.000	-	-
3	Pendapatan Anggaran Lain-lain	33.118.269	-	-
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	50.418.889	38.075.953	32,42
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.560.000	20.661.812	(77,93)
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.761.049	6.525.987	(57,69)
7	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	173.000	(100,00)
Jumlah		19.973.442.807	20.101.830.562	(0,64)

*Realisasi
Belanja Negara
Rp
23.472.198.008*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp23.472.198.008 atau 63,71% dari anggaran belanja sebesar Rp36.841.620.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
TA 2025 dan TA 2025*

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	12.305.593.000	12.144.187.018	98,69
Belanja Barang	14.635.219.000	6.490.419.528	44,35
Belanja Modal	9.900.808.000	4.863.169.297	49,12
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	36.841.620.000	23.497.775.843	63,78
Pengembalian		(25.577.835)	-
Jumlah	36.841.620.000	23.472.198.008	63,71

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 17,88%, karena adanya kebijakan efisiensi (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025) menyebabkan sebagian anggaran terblokir dan pagu efektif yang bisa digunakan sebesar Rp23,703.357.000,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12.119.025.183	11.973.780.406	1,21
Belanja Barang	6.490.003.528	12.264.884.025	(47,08)
Belanja Modal	4.863.169.297	4.344.266.431	11,94
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	23.472.198.008	28.582.930.862	(17,88)

Belanja Pegawai **B.2.1 Belanja Pegawai**

Rp12.119.025.183

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.119.025.183 dan Rp11.973.780.406. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,21% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan 10 PPPK baru per Oktober 2025

*Perbandingan Belanja Pegawai
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	3,633,880,200	3,757,889,000	(3.30)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	48,950	50,990	(4.00)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	305,900,780	317,297,890	(3.59)
Belanja Tunj. Anak PNS	79,191,306	82,646,142	(4.18)
Belanja Tunj. Struktural PNS	17,640,000	17,640,000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	173,464,000	205,530,000	(15.60)
Belanja Tunj. PPh PNS	59,136,963	59,741,029	(1.01)
Belanja Tunj. Beras PNS	197,779,020	207,121,200	(4.51)
Belanja Uang Makan PNS	401,300,000	333,622,000	20.29
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	543,550,000	542,975,000	0.11
Belanja Tunjangan Umum PNS	135,885,000	139,820,000	(2.81)
Belanja Gaji Pokok PPPK	586,599,696	407,416,000	43.98
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,274	7,125	30.16
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	46,897,507	31,475,600	49.00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	12,162,907	8,404,608	44.72
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	70,601,666	52,220,000	35.20
Belanja Tunjangan Beras PPPK	40,500,885	27,664,440	46.40
Belanja Uang Makan PPPK	80,774,000	46,473,000	73.81
Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,695,000	-	-
Belanja Uang Lembur	30,803,000	67,828,000	(54.59)
Belanja Uang Lembur PPPK	4,188,000	3,293,000	27.18
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,944,447,731	5,130,321,111	(3.62)
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	774,731,133	545,641,448	41.99
Jumlah Belanja Kotor	12,144,187,018	11,985,077,583	1.33
Pengembalian Belanja Pegawai	(25,161,835)	(11,297,177)	122.73
Jumlah Belanja	12,119,025,183	11,973,780,406	1.21

Belanja Barang B.2.2 Belanja Barang

Rp 6.490.003.528

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 6.490.003.528 dan Rp12.264.884.025. Realisasi belanja Barang pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 47,08%. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian Kesehatan TA 2025 sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menginstruksikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, yang mengakibatkan pemblokiran sebagian anggaran belanja barang.

*Perbandingan Belanja Barang
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	802,603,990	2,791,346,356	(71.25)
Belanja Barang Non Operasional	814,280,865	568,592,880	43.21
Belanja Jasa	1,920,283,526	1,990,372,780	(3.52)
Belanja Pemeliharaan	1,482,431,123	2,065,815,096	(28.24)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,470,820,024	4,963,267,161	(70.37)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	6,490,419,528	12,379,394,273	(47.57)
Pengembalian Belanja	(416,000)	(114,510,248)	(99.64)
Jumlah Belanja	6,490,003,528	12,264,884,025	(47.08)

Belanja Modal **B.2.3 Belanja Modal**

Rp 4.863.169.297

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.863.169.297 dan Rp4.344.266.431. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar 11,44% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal pada Tahun 2024. Kenaikan ini sejalan dengan adanya peningkatan pagu alokasi anggaran Belanja Modal pada TA 2025.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,863,169,297	3,937,805,000	23.50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	369,806,135	(100.00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	36,655,296	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	4,863,169,297	4,344,266,431	11.94
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	4,863,169,297	4,344,266,431	11.94

Belanja Modal Tanah Rp0

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 4.863.169.297

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.863.169.297, mengalami peningkatan sebesar 23,50% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2024. Kenaikan ini sejalan dengan adanya peningkatan pagu alokasi anggaran Belanja Modal pada TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,863,169,297	3,937,805,000	23.50
Jumlah Belanja Kotor	4,863,169,297	3,937,805,000	23.50
Pengembalian	-	-	0.00
Jumlah Belanja	4,863,169,297	3,937,805,000	23.50

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp369.806.135.

Perbandingan Realisasi Belanja
Modal Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	369,806,135	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	0	369,806,135	(100.00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	369,806,135	(100.00)

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing Rp0.

Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp36.655.296.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Dokumen Acuan Metode Kerja	0	36,655,296	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	36,655,296	0.00
Pengembalian	-	-	(100.00)
Jumlah Belanja	0	36,655,296	0.00

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing Rp0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24
Kuitansi yang belum di GU	-	-
Uang di Rekening Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNB
Rp409.931.000*

C.2 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 409.931.000 dan Rp127.143.000. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNB per 31 Desember 2025 BPAFK Surabaya sebesar Rp409.931.000 terdiri dari Piutang Pengujian/Kalibrasi/kalibrasi sebesar Rp338.531.000 dan Piutang TLD Badge sebesar Rp71.400.000.

Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP
Per 31 Desember 2025 & Per 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pengujian/Kalibrasi/kalibrasi	338.531.000	113.643.000
TLD Badge	71.400.000	13.500.000
Jumlah	409.931.000	127.143.000

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak
(Rp49.834.530)*

C.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp49.834.530) dan (Rp127.143.000). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih -
Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	361.906.000	0,50%	1.809.530
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	48.025.000	100%	48.025.000
Jumlah	409.931.000		49.834.530

Piutang macet BPAFK Surabaya belum bisa diajukan PPNTD dan pengurusannya ke PUPN karena belum lengkap dokumennya. Tetapi upaya-upaya yang lain telah dilakukan untuk mengurangi adanya piutang macet tersebut, antara lain dengan mendatangi faskes yang mempunyai piutang macet untuk melakukan konfirmasi serta penyelesaian atas piutang macet tersebut.

Persediaan
Rp660.073.304

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp660.073.304 dan Rp672.197.131. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024*

Jenis	31 Des 2025	31 Des 2024
Barang Konsumsi	657.298.304	672.197.131
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya/Bahan Baku	2.775.000	-
Jumlah	660.073.304	672.197.131

Dari nilai barang persediaan sebesar Rp660.073.304, barang persediaan yang bernilai paling besar diantara barang persediaan lainnya berupa amplop yaitu sebesar Rp 92.304.810. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

**Peralatan dan
Mesin**
Rp
102.124.046.234

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp102.124.046.234 dan Rp 97.260.876.937. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	97.260.876.937
Mutasi tambah:	4.863.169.297
Pembelian	4.863.169.297
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	102.124.046.234
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(82.217.969.539)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	19.906.076.695

Terdapat mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa alat pengujian dan kalibrasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah		Satuan Harga	Total Harga
		Kuantitas	Satuan		
1	Eye Phantom USG Mata	2	Unit	16.194.900	32.389.800
2	IPX 1-6 Tester	1	Unit	591.212.000	591.212.000
3	Micro Balance Single Chanel	1	Unit	762.070.500	762.070.500
4	Hipot Tester	1	Unit	111.999.000	111.999.000
5	LCR Meter	1	Unit	13.875.000	13.875.000
6	Programable Power Source	1	Unit	111.346.875	111.346.875
7	Sound Level Meter	1	Unit	73.260.000	73.260.000
8	Hand-ARM Vibration System	1	Unit	290.000.000	290.000.000
9	Spark Ignition Test Apparatus	1	Unit	519.630.300	519.630.300
10	Kalibrator Thermometer Non Kontak with Kalibrator Kit	1	Unit	198.989.700	198.989.700
11	SPO2 Simulator	1	Unit	72.372.000	72.372.000
12	Handheld Oscilloscope	1	Unit	88.578.000	88.578.000
13	Dosimetry Tools - 1D Scanner	1	Unit	187.701.000	187.701.000
14	Farmer Chamber 0,6 cm3 Waterproof	1	Unit	180.500.000	180.500.000
15	Surveymeter Gamma dan X-Rayf	2		63.200.000	126.400.000
16	Digital Photometer (1 set)	1	Paket	491.730.000	491.730.000
17	Airflow Capture Hood	1	Unit	92.700.000	92.700.000
18	Hydraulic Pressure Testing Machines	1	Unit	483.770.630	483.770.630
19	Laser Power Meter	1	Unit	67.150.000	67.150.000
20	Particle Counter	1	Unit	324.000.000	324.000.000
21	OptiLab Observer Perangkat Digital Mikroskop	3	Unit	9.750.000	29.250.001
22	High Speed Tachometer for Dental Handpieces Turbo Tester ATCP	1	Unit	14.244.491	14.244.491
TOTAL		26			4.863.169.297

*Gedung dan
Bangunan
Rp10.113.788.525*

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp10.113.788.525 dan Rp10.113.788.525. Tidak Terdapat mutasi tambah maupun kurang transaksi Gedung dan Bangunan pada tanggal

pelaporan.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	10.113.788.525
Mutasi tambah:	0
Pembelian	-
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	10.113.788.525
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.824.934.702)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	8.288.853.823

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp67.500.000*

C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp67.500.000 dan Rp67.500.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang terhadap transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	67.500.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	67.500.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(6.750.005)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	60.749.995

*Aset Tetap
Lainnya
Rp277.103.703*

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp277.103.703 dan Rp277.103.703. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap lainnya ini sampai dengan 31 Desember 2025.

**Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap**
(Rp84.049.654.246)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp84.049.654.246) dan Rp(Rp77.640.339.900). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	102.124.046.234	82.217.969.539	19.906.076.695
2	Gedung dan Bangunan	10.113.788.525	1.824.934.702	8.288.853.823
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.500.000	6.750.005	60.749.995
4	Aset Tetap Lainnya	277.103.703	0	277.103.703
Akumulasi Penyusutan		112.582.438.462	84.049.654.246	28.532.784.216

**Aset Tak
Berwujud**
Rp820.490.099

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp820.490.099 dan Rp820.490.099. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak ada Mutasi tambah maupun kurang aset tak berwujud sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Mutasi

transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	820.490.099
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	820.490.099
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(795.387.702)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	25.102.397

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan
Software	795.387.702
Aset Tak Berwujud Lainnya	25.102.397
Jumlah	820.490.099

*Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp99.883.154*

C.11 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi Penggunaannya berasal dari transaksi RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun) dimana BAST nya telah dicatat pada tahun 2025 namun proses pembayarannya dilakukan pada tahun 2026. BAST transaksi RPATA BPAFK Surabaya adalah tanggal 31 Desember 2025 dan SP2D pembayarannya tanggal 05 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	No BAST	Tgl BAST	NILAI RPATA	No SP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D Pembayaran
1	PENGADAAN JASA PENGEMUDI	BJ.01.04/E.X/7643/2025	31-DEC-25	12.539.222	'269991302000991	'05-JAN-26	12.440.251
2	PENGADAAN JASA PETUGAS KEAMANAN	BJ.01.04/E.X/7642/2025	31-DEC-25	37.726.266	'269991302000990	'05-JAN-26	37.428.580
3	PENGADAAN JASA PETUGAS KEBERSIHAN	BJ.01.04/E.X/7641/2025	31-DEC-25	37.617.666	'259991302000404	'05-JAN-26	37.320.753
4	PENGADAAN JASA LANGGANAN INTERNET	BJ.01.04/E.X/7640/2025	31-DEC-25	12.000.000	261350000000101	'05-JAN-26	10.594.595
TOTAL				99.883.154	TOTAL		97.784.179

Aset Lain-Lain
Rp 930.626.120

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp930.626.120 dan Rp930.626.120. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak ada Mutasi tambah maupun kurang Aset Lain-lain sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	930.626.120
Mutasi tambah:	
Aset Lain Lain	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	930.626.120
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(757.202.610)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	173.423.510

**Akumulasi
Penyusutan
Aset Lainnya**
(Rp1.693.279.812)

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp1.693.279.812) dan (Rp1.693.279.812). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	820.490.099	757.202.610	63.287.489
Aset Lain-lain	789.936.620	795.387.702	(5.451.082)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	140.689.500	140.689.500	-
Jumlah	1.751.116.219	1.693.279.812	57.836.407

**Utang kepada
Pihak Ketiga**
Rp138.193.027

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp138.193.027 dan Rp140.358.175. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Listrik Bulan Desember 2025 yang Masih Harus Dibayar	38.188.242	Proses pembayaran pada bulan Januari 2026
2	Belanja Telpon Bulan Desember 2025 yang Masih Harus Dibayar	121.631	Proses pembayaran pada bulan Januari 2026
3	Belanja Jasa Pengemudi Bulan Desember 2025	12.539.222	Pembayaran akan dilaksanakan pada bulan Januari 2026 dengan menggunakan mekanisme RPATA, berdasarkan BAST per tanggal 31 Desember 2025
4	Belanja Jasa Petugas Keamanan Bulan Desember 2025	37.726.266	Pembayaran akan dilaksanakan pada bulan Januari 2026 dengan menggunakan mekanisme RPATA, berdasarkan BAST per tanggal 31 Desember 2025
5	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Bulan Desember 2025	37.617.666	Pembayaran akan dilaksanakan pada bulan Januari 2026 dengan menggunakan mekanisme RPATA, berdasarkan BAST per tanggal 31 Desember 2025
6	Belanja Jasa Langganan Internet Bulan Desember 2025	12.000.000	Pembayaran akan dilaksanakan pada bulan Januari 2026 dengan menggunakan mekanisme RPATA, berdasarkan BAST per tanggal 31 Desember 2025
	Total	138.193.027	

Ekuitas

Rp29.572.480.524

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp29.572.480.524 dan Rp30.760.134.628. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp

20.214.891.489

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 20.214.891.489 dan Rp19.410.289.263. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

URAIAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	20.147.572.600	19.372.040.310	4,00
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	16.900.000	0	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	50.418.889	38.075.953	32,42
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		173.000	(100,00)
Jumlah	20.214.891.489	19.410.116.263	4,15

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelaksanaan pengujian dan kalibrasi ke Fasyankes.

Nilai Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan pada LRA Pendapatan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp19.939.424.538. Sedangkan nilai Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan pada LO per Desember 2025 adalah sebesar Rp20.147.572.600. Rincian nilai Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

AKUN	URAIAN	Realisasi Menurut		SELISIH
		Laporan Realisasi Pendapatan TA 2025	LO TA 2025	
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	19.864.784.600	20.147.572.600	(282.788.000)
Jumlah		19.864.784.600	20.147.572.600	(282.788.000)

Jika realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan pada Laporan Operasional Per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan pada Laporan LRA Pendapatan Per 31 Desember 2025 terdapat selisih sebesar Rp282.788.000. Selisih tersebut berasal dari penambahan piutang selama 2025 sebesar Rp361.906.000 dikurangi pelunasan nilai piutang selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp79.118.000,-.

URAIAN	DEBET	KREDIT	SELISIH
saldo 1 Januari 2025	127.143.000	-	127.143.000
saldo 31 Desember 2025		409.931.000	(409.931.000)
JUMLAH	127.143.000	409.931.000	(282.788.000)

Beban Pegawai
Rp
12.119.025.183

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.119.025.183 dan Rp11.973.780.406. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024*

URAIAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	3.633.880.200	3.757.889.000	(3,30)
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	(14.585.608)	0	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	48.950	48.813	0,28
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(288)	0	0,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	305.900.780	317.297.890	(3,59)
Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	(1.633.560)	0	0,00
Belanja Tunj. Anak PNS	79.191.306	82.646.142	(4,18)
Belanja Tunj. Struktural PNS	17.640.000	17.640.000	0,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	173.464.000	199.290.000	(12,96)
Belanja Tunj. PPh PNS	59.136.963	59.741.029	(1,01)
Belanja Tunj. Beras PNS	197.779.020	207.121.200	(4,51)
Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	(579.360)	0	0,00
Belanja Uang Makan PNS	401.300.000	333.622.000	20,29
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	543.550.000	540.125.000	0,63
Belanja Tunjangan Umum PNS	135.885.000	137.615.000	(1,26)
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	(3.740.000)	0	0,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	586.599.696	407.416.000	43,98
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.274	7.125	30,16
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	46.897.507	31.475.600	49,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	12.162.907	8.404.608	44,72
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	70.601.666	52.220.000	35,20
Belanja Tunjangan Beras PPPK	40.500.885	27.664.440	46,40
Belanja Uang Makan PPPK	80.774.000	46.473.000	73,81
Belanja Tunjangan Umum PPPK	4.695.000	0	0,00
Belanja Uang Lembur	30.803.000	67.828.000	(54,59)
Belanja Uang Lembur PPPK	4.188.000	3.293.000	27,18
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4.944.447.731	5.130.321.111	(3,62)
Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	(4.623.019)	0	0,00
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	774.731.133	545.641.448	41,99
Jumlah	12.119.025.183	11.973.780.406	1,21

Nilai realisasi belanja Pegawai pada LRA Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 12.119.025.183, sedangkan beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) Per 31 Desember 2025 adalah Rp 12.119.025.183. Adapun rinciannya sebagai berikut:

URAIAN	LRA TA 2025	LO TA 2025	SELISIH
Belanja Gaji Pokok PNS	3.619.294.592	3.619.294.592	0
Belanja Pembulatan Gaji PNS	48.662	48.662	0
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	304.267.220	304.267.220	0
Belanja Tunj. Anak PNS	79.191.306	79.191.306	0
Belanja Tunj. Struktural PNS	17.640.000	17.640.000	0
Belanja Tunj. Fungsional PNS	173.464.000	173.464.000	0
Belanja Tunj. PPh PNS	59.136.963	59.136.963	0
Belanja Tunj. Beras PNS	197.199.660	197.199.660	0
Belanja Uang Makan PNS	401.300.000	401.300.000	0
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	543.550.000	543.550.000	0
Belanja Tunjangan Umum PNS	132.145.000	132.145.000	0
Belanja Gaji Pokok PPPK	586.599.696	586.599.696	0
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.274	9.274	0
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	46.897.507	46.897.507	0
Belanja Tunjangan Anak PPPK	12.162.907	12.162.907	0
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	70.601.666	70.601.666	0
Belanja Tunjangan Beras PPPK	40.500.885	40.500.885	0
Belanja Uang Makan PPPK	80.774.000	80.774.000	0
Belanja Tunjangan Umum PPPK	4.695.000	4.695.000	0
Belanja Uang Lembur	30.803.000	30.803.000	0
Belanja Uang Lembur PPPK	4.188.000	4.188.000	0
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4.939.824.712	4.939.824.712	0
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	774.731.133	774.731.133	0
Jumlah	12.119.025.183	12.119.025.183	0

Tidak terdapat selisih belanja Pegawai di LRA Per 31 Desember 2025 dengan beban Pegawai pada LO Per 31 Desember 2025.

Beban
Persediaan
Rp
358.212.853

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp358.212.853 dan Rp836.675.814. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	327.277.153	798.111.399	(58,99)
Beban Persediaan bahan baku	30.935.700	38.564.415	(19,78)
Beban Persediaan suku cadang	-	-	0,00
Jumlah	358.212.853	836.675.814	(57,19)

Realisasi Belanja Persediaan per 31 Desember 2025 menurut LRA TA 2025 sebesar Rp399.897.635. Sedangkan menurut Laporan Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp358.212.853. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan sampai dengan 31 Desember 2025.

Rincian perolehan nilai beban persediaan pada Laporan Operasional TA 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo awal persediaan TA 2025	672.197.131
Penambahan:	399.897.635
- Pembelian /Realisasi Belanja Persediaan Semester TA 2025	399.897.635
- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-
- Koreksi Nilai Persediaan	-
Pengurangan:	713.881.913
- Persediaan TA 2025	660.073.304
- Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-
- Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-
- Beban Persediaan Suku Cadang	53.808.609
Jumlah	358.212.853

*Beban Barang
dan Jasa
Rp3.131.342.444*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.131.342.444 dan Rp4.451.612.434. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	589.180.615,	1.203.974.702	(51,06)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,	414.102.814	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	54.073.375,	79.023.950	(31,57)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	159.350.000,	108.248.000	47,21
Beban Barang Operasional Lainnya	0,	85.567.000	(100,00)
Beban Bahan	71.541.000,	74.434.000	(3,89)
Beban Honor Output Kegiatan	400.000,	55.760.000	(99,28)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	347.032.230,	398.398.880	(12,89)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0,	40.000.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	482.679.450,	575.789.900	(16,17)
Beban Langganan Telepon	6.751.513,	7.072.368	(4,54)
Beban Langganan Air	13.172.760,	18.904.320	(30,32)
Beban Jasa Konsultan	0,	60.661.500	(100,00)
Beban Jasa Profesi	21.250.000,	54.400.000	(60,94)
Beban Jasa Lainnya	1.183.091.361,	1.267.375.000	(6,65)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	184.298.915,	0	0,00
Beban Jasa Pos dan Giro	18.521.225,	0	0,00
Beban Sewa	0,	7.900.000	(100,00)
Jumlah	3.131.342.444	4.451.612.434	(29,66)

Realisasi belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2025 adalah sebesar Rp3.137.270.746, sedangkan Realisasi belanja Barang dan Jasa pada Laporan Operasional TA 2025 adalah sebesar Rp3.131.342.444. Berikut perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2025 dan LO TA 2025.

*Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa
per 31 Des 2025 Menurut LO dan LRA*

URAIAN	LO TA 2025	LRA TA 2025	SELISIH
Beban Keperluan Perkantoran	589.180.615	589.180.615	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	54.073.375	54.073.375	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	159.350.000	159.350.000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	-
Beban Bahan	71.541.000	71.541.000	-
Beban Honor Output Kegiatan	400.000	400.000	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	347.032.230	342.442.230	4.590.000
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	0	-
Beban Langganan Listrik	482.679.450	491.625.776	(8.946.326)
Beban Langganan Telepon	6.751.513	6.752.529	(1.016)
Beban Langganan Air	13.172.760	14.743.720	(1.570.960)
Beban Jasa Konsultan	0	0	-
Beban Jasa Profesi	21.250.000	21.250.000	-
Beban Jasa Lainnya	1.183.091.361	1.183.091.361	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	184.298.915	184.298.915	-
Beban Jasa Pos dan Giro	18.521.225	18.521.225	-
Beban Sewa	0	0	-
Jumlah	3.131.342.444	3.137.270.746	(5.928.302)

Terdapat selisih sebesar Rp5.928.302 dari hasil perbandingan antara realisasi belanja barang dan jasa di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2025 dengan realisasi belanja barang dan jasa di Laporan Operasional (LO) TA 2025. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Barang dan Jasa TA 2025	3.137.270.746
Penambahan:	42.899.873
- Langganan Listrik Bulan Desember TA 2025 yang masih harus dibayar	38.188.242
- Langganan Telepon Bulan Desember TA 2025 yang masih harus dibayar	121.631
- Koreksi akun dari belanja barang non operasional lainnya menjadi akun perjalanan Dinas Dalam Kota	4.590.000
Pengurangan:	48.828.175
- Pembayaran langganan Listrik Bulan Desember TA 2024	47.134.568
- Pembayaran Langganan Telepon Bulan Desember TA 2024	122.647
- Pembayaran langganan Air Bulan Desember TA 2024	1.570.960
Jumlah	3.131.342.444

**Beban
Pemeliharaan
Rp
1.536.239.732**

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.536.239.732 dan Rp2.261.783.420. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54.881.277	488.422.640	(88,76)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.427.549.846	1.574.208.643	(9,32)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	36.410.853	(100,00)
Beban Persediaan suku cadang	53.808.609	162.741.284	(66,94)
Jumlah	1.536.239.732	2.261.783.420	(32,08)

Realisasi belanja Pemeliharaan pada LRA TA 2025 adalah sebesar Rp1.482.431.123, sedangkan Realisasi belanja pemeliharaan pada LO TA 2025 adalah sebesar Rp1.536.239.732. Berikut perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan pada LRA TA 2025 dan LO TA 2025.

Terdapat selisih sebesar Rp53.808.609 dari hasil perbandingan antara realisasi belanja pemeliharaan di LRA TA 2025 dengan realisasi belanja barang dan jasa di LO TA 2025. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban Persediaan suku cadang	53.808.609
Beban Persediaan suku cadang	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	53.808.609

*Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan
per 31 Des 2025 Menurut LO dan LRA*

URAIAN	LO TA 2025	LRA TA 2025	SELISIH
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54.881.277	54.881.277	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.427.549.846	1.427.549.846	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	-
Beban Persediaan suku cadang	53.808.609	0	53.808.609
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	-
Jumlah	1.536.239.732	1.482.431.123	53.808.609

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp
1.465.814.024*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.465.814.024 dan Rp4.851.940.726. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.173.406.170	3.472.572.357	(66,21)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.510.000	112.500.000	(54,21)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	222.073.734	297.172.826	(25,27)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.824.120	969.695.543	(98,06)
Jumlah	1.465.814.024	4.851.940.726	(69,79)

Realisasi belanja Perjalanan Dinas pada LRA TA 2025 adalah sebesar Rp1.470.404.024, sedangkan beban belanja perjalanan dinas pada LO TA 2025 adalah sebesar Rp1.465.814.024. Berikut perbandingan Realisasi Belanja

Perjalanan Dinas pada LRA TA 2025 dan Beban Perjalanan Dinas pada LO TA 2025

Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Perjalanan Dinas per 31 Des 2025 Menurut LO dan LRA

URAIAN	LO TA 2025	LRA TA 2025	SELISIH
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.173.406.170	1.173.406.170	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.510.000	56.100.000	(4.590.000)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	222.073.734	222.073.734	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.824.120	18.824.120	-
Jumlah	1.465.814.024	1.470.404.024	(4.590.000)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat selisih antara realisasi belanja perjalanan dinas di LRA TA 2025 dengan beban belanja perjalanan dinas di LO TA 2025 sebesar Rp4.590.000. Selisih tersebut disebabkan adanya koreksi akun dari belanja barang non operasional lainnya ke akun perjalanan dinas dalam kota.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

**Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp6.409.314.346**

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.409.314.346 dan Rp6.482.277.989. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.179.126.508	6.256.558.720	(1,24)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	228.500.338	224.031.769	1,99
Beban Penyusutan Irigasi	1.687.500	1.687.500	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.409.314.346	6.482.277.989	(1,13)

**Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp77.308.470)**

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp77.308.470) dan (Rp664.353.500). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	(77.308.470)	(664.353.500)	(88,36)
Jumlah	(77.308.470)	(664.353.500)	(88,36)

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp7.321.049*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp7.321.049 dan Rp(572.584.201). Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 merupakan jumlah dari Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp7.321.049. Berikut rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 :

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar :	0	(599.772.000)	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	599.772.000	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional :	7.321.049	27.187.799	(73,07)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	2.761.049	6.525.987	(89,84)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	4.560.000	20.661.812	(30,13)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	(100,00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	7.321.049	(572.584.201)	(101,28)

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp7.321.049 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu terdiri dari :

- 1.Pengembalian Kelebihan Uang Makan PNS Bulan Desember 2024 sebesar Rp 2.171.050,-
- 2.Pengembalian Kelebihan Uang Makan PPPK Bulan Desember 2024 sebesar Rp 492.100,-
- 3.Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja PNS Bulan Desember 2024 sebesar Rp 97.899,-

Sedangkan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp4.560.000,- merupakan pengembalian kelebihan pembayaran transport kegiatan dalam kabupaten/kota dan biaya paket meeting fullday (hasil audit kinerja Irjen Kemenkes pada BPAFK Surabaya TA 2023 s.d 2024).

Pos Luar Biasa **D.12 Pos Luar Biasa**

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp30.760.134.628

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.760.134.628 dan Rp0.

Defisit LO

(Rp4.720.427.574)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp4.720.427.574) dan (Rp11.356.012.227). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas

Rp3.532.773.470

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.532.773.470 dan Rp42.116.146.855. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(19.939.424.538)
Ditagihkan ke Entitas Lain	23.472.198.008
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	3.532.773.470

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar (Rp19.939.424.538) sedangkan DKEL sebesar Rp23.472.198.008. Ditagihkan dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp19.939.424.538) merupakan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Desember 2025. Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp23.472.198.008 merupakan realisasi anggaran belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja s.d. 31 Desember 2025.

E.3.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sebesar Rp0 merupakan perpindahan aset/kewajiban dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya kepada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

E.3.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Ekuitas Akhir
Rp
29.572.480.524

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp29.572.480.524 dan Rp30.760.134.628. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp29.710.673.551 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp138.193.027.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Bulan September 2025, terjadi pergantian pimpinan BPAFK Surabaya dari Dr. Wahyudi Ifani, ST. M.Si (sesuai SK Nomor KP.03.03/A/4334/R/2025 Tanggal 4 September 2025) ke Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM (Sesuai SK Nomor KP.03.04/E/1599/2025 Tanggal 4 September 2025).

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	23,472,198,008
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	19,939,424,538	0
3.0	425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	0	19,868,784,600
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	16,900,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	50,418,889
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,761,049
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,560,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	33,118,269
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,633,880,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	48,950	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	305,900,780	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	79,191,306	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,640,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	173,464,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	59,136,963	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	197,779,020	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	401,300,000	0
3.0	511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	543,550,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	135,885,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	586,599,696	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,274	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	46,897,507	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	12,162,907	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	70,601,666	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	40,500,885	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	80,774,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,695,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	30,803,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	4,188,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,944,447,731	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	774,731,133	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	589,180,615	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	54,073,375	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	159,350,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	71,541,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	400,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	342,442,230	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS
KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	399,897,635	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	491,625,776	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,752,529	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	14,743,720	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	184,298,915	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	18,521,225	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	21,250,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,183,091,361	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54,881,277	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,427,549,846	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,173,406,170	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56,100,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	222,489,734	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,824,120	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,863,169,297	0
3.1	425285	Pengembalian Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	4,000,000	0
3.1	425999	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	33,118,269	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	14,585,608
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	288
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,633,560
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	579,360
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,740,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	4,623,019
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	416,000
JUMLAH			43,474,318,650	43,474,318,650

Keterangan :

FINAL

SURABAYA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARANAHADI WAHYU HIDAYAT
197201301992031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	409,931,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0	49,834,530
0.0	117111	Barang Konsumsi	657,298,304	0
0.0	117131	Bahan Baku	2,775,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	102,124,046,234	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,113,788,525	0
0.0	134112	Irigasi	67,500,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	277,103,703	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	82,217,969,539
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,824,934,702
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	6,750,005
0.0	162151	Software	795,387,702	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	25,102,397	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	99,883,154	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	789,936,620	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	140,689,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	757,202,610
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	795,387,702
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	140,689,500
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	38,309,873
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	99,883,154
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	23,472,198,008
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	19,939,424,538	0
0.0	391111	Ekuitas	0	30,760,134,628
3.0	425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	0	20,147,572,600
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	16,900,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	50,418,889
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,761,049
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,560,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,619,294,592	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	48,662	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	304,267,220	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	79,191,306	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	17,640,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	173,464,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	59,136,963	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	199,199,660	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	401,300,000	0
3.0	511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	543,550,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	132,145,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	586,599,696	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	9,274	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	46,897,507	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	12,162,907	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	70,601,666	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	40,500,885	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	80,774,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	4,695,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	30,803,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	4,188,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,939,824,712	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	774,731,133	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	589,180,615	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	54,073,375	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	159,350,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	71,541,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	347,032,230	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	482,679,450	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	6,751,513	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	13,172,760	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	184,298,915	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	18,521,225	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	21,250,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,183,091,361	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54,881,277	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,427,549,846	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,173,406,170	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	51,510,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	222,073,734	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,824,120	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,179,126,508	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	228,500,338	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,687,500	0
3.0	593111	Beban Persewaan dan Konsumsi yang diterbitkan oleh Balai Besar Sortifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),	227,277,153	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS
KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM
Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	53,808,609	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	30,935,700	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	77,308,470
JUMLAH			160,462,815,259	160,462,815,259

Keterangan :
FINAL

SURABAYA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AHADI WAHYU HIDAYAT
NIP 197201301992031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN 07
SATUAN KERJA : BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA 690805

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:37 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	15,500,000,000	19,939,424,538	4,439,424,538	129	15,000,000,000	20,101,830,562	(5,101,830,562)	134
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	15,500,000,000	19,939,424,538	4,439,424,538	129	15,000,000,000	20,101,830,562	(5,101,830,562)	134
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	15,500,000,000	19,939,424,538	4,439,424,538	129	15,000,000,000	20,101,830,562	(5,101,830,562)	134
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	36,841,620,000	23,472,198,008	(13,369,421,992)	64	31,748,430,000	28,582,930,862	3,165,499,138	90
1. Belanja Pegawai	12,305,593,000	12,119,025,183	(186,567,817)	98	12,511,005,000	11,973,780,406	537,224,594	96
2. Belanja Barang	14,635,219,000	6,490,003,528	(8,145,215,472)	44	14,831,562,000	12,264,884,025	2,566,677,975	83
3. Belanja Modal	9,900,808,000	4,863,169,297	(5,037,638,703)	49	4,405,863,000	4,344,266,431	61,596,569	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN 07
SATUAN KERJA : BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA 690805

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:37 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	36,841,620,000	23,472,198,008	(13,369,421,992)	64	31,748,430,000	28,582,930,862	3,165,499,138	90
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

SURABAYA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AHADI WAHYU HIDAYAT
NIP 197201301992031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:37 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	20,214,891,489	19,410,289,263	804,602,226	4.145
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	20,214,891,489	19,410,289,263	804,602,226	4.145
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	20,214,891,489	19,410,289,263	804,602,226	4.145
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	12,119,025,183	11,973,780,406	145,244,777	1.213
Beban Persediaan	358,212,853	836,675,814	(478,462,961)	(57.186)
Beban Barang dan Jasa	3,131,342,444	4,451,612,434	(1,320,269,990)	(29.658)
Beban Pemeliharaan	1,536,239,732	2,261,783,420	(725,543,688)	(32.078)
Beban Perjalanan Dinas	1,465,814,024	4,851,940,726	(3,386,126,702)	(69.789)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:37 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,409,314,346	6,482,277,989	(72,963,643)	(1.126)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(77,308,470)	(664,353,500)	587,045,030	(88.363)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	24,942,640,112	30,193,717,289	(5,251,077,177)	(17.391)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,727,748,623)	(10,783,428,026)	6,055,679,403	(56.157)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(599,772,000)	599,772,000	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	599,772,000	(599,772,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,321,049	27,187,799	(19,866,750)	(73.072)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,321,049	27,187,799	(19,866,750)	(73.072)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7,321,049	(572,584,201)	579,905,250	(101.279)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,720,427,574)	(11,356,012,227)	6,635,584,653	(58.432)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,720,427,574)	(11,356,012,227)	6,635,584,653	(58.432)

Keterangan :

FINAL

SURABAYA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AHADI WAHYU HIDAYAT
NIP 197201301992031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS
KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:37 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	30,760,134,628	0	30,760,134,628	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,720,427,574)	(11,356,012,227)	6,635,584,653	(58.43)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,532,773,470	42,116,146,855	(38,583,373,385)	(91.61)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,187,654,104)	30,760,134,628	(31,947,788,732)	(103.86)
EKUITAS AKHIR	29,572,480,524	30,760,134,628	(1,187,654,104)	(3.86)

Keterangan :

FINAL

SURABAYA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AHADI WAHYU HIDAYAT
NIP 197201301992031002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	409,931,000	127,143,000	282,788,000	222.42
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(49,834,530)	(127,143,000)	77,308,470	(60.80)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	360,096,470	0	360,096,470	0.00
Persediaan	660,073,304	672,197,131	(12,123,827)	(1.80)
JUMLAH ASET LANCAR	1,020,169,774	672,197,131	347,972,643	51.77
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	102,124,046,234	97,260,876,937	4,863,169,297	5.00
Gedung dan Bangunan	10,113,788,525	10,113,788,525	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	67,500,000	67,500,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	277,103,703	277,103,703	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(84,049,654,246)	(77,640,339,900)	(6,409,314,346)	8.26
JUMLAH ASET TETAP	28,532,784,216	30,078,929,265	(1,546,145,049)	(5.14)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	820,490,099	820,490,099	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	99,883,154	91,530,000	8,353,154	9.13
Aset Lain-lain	930,626,120	930,626,120	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,693,279,812)	(1,693,279,812)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	157,719,561	149,366,407	8,353,154	5.59
JUMLAH ASET	29,710,673,551	30,900,492,803	(1,189,819,252)	(3.85)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	138,193,027	140,358,175	(2,165,148)	(1.54)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	138,193,027	140,358,175	(2,165,148)	(1.54)
JUMLAH KEWAJIBAN	138,193,027	140,358,175	(2,165,148)	(1.54)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	29,572,480,524	30,760,134,628	(1,187,654,104)	(3.86)
JUMLAH EKUITAS	29,572,480,524	30,760,134,628	(1,187,654,104)	(3.86)
JUMLAH EKUITAS	29,572,480,524	30,760,134,628	(1,187,654,104)	(3.86)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	29,710,673,551	30,900,492,803	(1,189,819,252)	(3.85)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

SURABAYA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AHADI WAHYU HIDAYAT
NIP 197201301992031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	23,472,198,008
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	19,939,424,538	0
3.0	425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	0	19,868,784,600
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	16,900,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	50,418,889
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,761,049
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,560,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	33,118,269
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,633,880,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	48,950	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	305,900,780	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	79,191,306	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,640,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	173,464,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	59,136,963	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	197,779,020	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	401,300,000	0
3.0	511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	543,550,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	135,885,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	586,599,696	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,274	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	46,897,507	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	12,162,907	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	70,601,666	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	40,500,885	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	80,774,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,695,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	30,803,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	4,188,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,944,447,731	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	774,731,133	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	589,180,615	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	54,073,375	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	159,350,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	71,541,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	400,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	342,442,230	0

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS
KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	399,897,635	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	491,625,776	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,752,529	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	14,743,720	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	184,298,915	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	18,521,225	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	21,250,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,183,091,361	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54,881,277	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,427,549,846	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,173,406,170	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56,100,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	222,489,734	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,824,120	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,863,169,297	0
3.1	425285	Pengembalian Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	4,000,000	0
3.1	425999	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	33,118,269	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	14,585,608
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	288
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,633,560
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	579,360
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,740,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	4,623,019
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	416,000
JUMLAH			43,474,318,650	43,474,318,650

Keterangan :

FINAL

SURABAYA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARANAHADI WAHYU HIDAYAT
197201301992031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	409,931,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0	49,834,530
0.0	117111	Barang Konsumsi	657,298,304	0
0.0	117131	Bahan Baku	2,775,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	102,124,046,234	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,113,788,525	0
0.0	134112	Irigasi	67,500,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	277,103,703	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	82,217,969,539
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,824,934,702
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	6,750,005
0.0	162151	Software	795,387,702	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	25,102,397	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	99,883,154	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	789,936,620	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	140,689,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	757,202,610
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	795,387,702
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	140,689,500
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	38,309,873
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	99,883,154
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	23,472,198,008
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	19,939,424,538	0
0.0	391111	Ekuitas	0	30,760,134,628
3.0	425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	0	20,147,572,600
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	16,900,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	50,418,889
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,761,049
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,560,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,619,294,592	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	48,662	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	304,267,220	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	79,191,306	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	17,640,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	173,464,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	59,136,963	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	199,199,660	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	401,300,000	0
3.0	511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	543,550,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	132,145,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	586,599,696	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	9,274	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	46,897,507	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	12,162,907	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	70,601,666	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	40,500,885	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	80,774,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	4,695,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	30,803,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	4,188,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,939,824,712	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	774,731,133	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	589,180,615	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	54,073,375	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	159,350,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	71,541,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	347,032,230	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	482,679,450	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	6,751,513	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	13,172,760	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	184,298,915	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	18,521,225	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	21,250,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,183,091,361	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54,881,277	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,427,549,846	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,173,406,170	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	51,510,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	222,073,734	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,824,120	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,179,126,508	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	228,500,338	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,687,500	0
3.0	593111	Beban Persewaan dan Konsumsi yang diterbitkan oleh Balai Besar Sortifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),	227,277,153	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS
KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM
Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	53,808,609	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	30,935,700	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	77,308,470
JUMLAH			160,462,815,259	160,462,815,259

Keterangan :

FINAL

SURABAYA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AHADI WAHYU HIDAYAT
NIP 197201301992031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS
KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:37 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	30,760,134,628	0	30,760,134,628	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,720,427,574)	(11,356,012,227)	6,635,584,653	(58.43)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,532,773,470	42,116,146,855	(38,583,373,385)	(91.61)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,187,654,104)	30,760,134,628	(31,947,788,732)	(103.86)
EKUITAS AKHIR	29,572,480,524	30,760,134,628	(1,187,654,104)	(3.86)

Keterangan :

FINAL

SURABAYA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AHADI WAHYU HIDAYAT
NIP 197201301992031002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	409,931,000	127,143,000	282,788,000	222.42
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(49,834,530)	(127,143,000)	77,308,470	(60.80)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	360,096,470	0	360,096,470	0.00
Persediaan	660,073,304	672,197,131	(12,123,827)	(1.80)
JUMLAH ASET LANCAR	1,020,169,774	672,197,131	347,972,643	51.77
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	102,124,046,234	97,260,876,937	4,863,169,297	5.00
Gedung dan Bangunan	10,113,788,525	10,113,788,525	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	67,500,000	67,500,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	277,103,703	277,103,703	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(84,049,654,246)	(77,640,339,900)	(6,409,314,346)	8.26
JUMLAH ASET TETAP	28,532,784,216	30,078,929,265	(1,546,145,049)	(5.14)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	820,490,099	820,490,099	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	99,883,154	91,530,000	8,353,154	9.13
Aset Lain-lain	930,626,120	930,626,120	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,693,279,812)	(1,693,279,812)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	157,719,561	149,366,407	8,353,154	5.59
JUMLAH ASET	29,710,673,551	30,900,492,803	(1,189,819,252)	(3.85)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	138,193,027	140,358,175	(2,165,148)	(1.54)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	138,193,027	140,358,175	(2,165,148)	(1.54)
JUMLAH KEWAJIBAN	138,193,027	140,358,175	(2,165,148)	(1.54)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	29,572,480,524	30,760,134,628	(1,187,654,104)	(3.86)
JUMLAH EKUITAS	29,572,480,524	30,760,134,628	(1,187,654,104)	(3.86)
JUMLAH EKUITAS	29,572,480,524	30,760,134,628	(1,187,654,104)	(3.86)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	29,710,673,551	30,900,492,803	(1,189,819,252)	(3.85)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:38 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

SURABAYA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AHADI WAHYU HIDAYAT
NIP 197201301992031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:37 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	20,214,891,489	19,410,289,263	804,602,226	4.145
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	20,214,891,489	19,410,289,263	804,602,226	4.145
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	20,214,891,489	19,410,289,263	804,602,226	4.145
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	12,119,025,183	11,973,780,406	145,244,777	1.213
Beban Persediaan	358,212,853	836,675,814	(478,462,961)	(57.186)
Beban Barang dan Jasa	3,131,342,444	4,451,612,434	(1,320,269,990)	(29.658)
Beban Pemeliharaan	1,536,239,732	2,261,783,420	(725,543,688)	(32.078)
Beban Perjalanan Dinas	1,465,814,024	4,851,940,726	(3,386,126,702)	(69.789)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : (07) DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (690805) BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:37 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,409,314,346	6,482,277,989	(72,963,643)	(1.126)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(77,308,470)	(664,353,500)	587,045,030	(88.363)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	24,942,640,112	30,193,717,289	(5,251,077,177)	(17.391)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,727,748,623)	(10,783,428,026)	6,055,679,403	(56.157)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(599,772,000)	599,772,000	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	599,772,000	(599,772,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,321,049	27,187,799	(19,866,750)	(73.072)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,321,049	27,187,799	(19,866,750)	(73.072)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7,321,049	(572,584,201)	579,905,250	(101.279)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,720,427,574)	(11,356,012,227)	6,635,584,653	(58.432)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,720,427,574)	(11,356,012,227)	6,635,584,653	(58.432)

Keterangan :

FINAL

SURABAYA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AHADI WAHYU HIDAYAT
NIP 197201301992031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN 07
SATUAN KERJA : BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA 690805

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:37 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	15,500,000,000	19,939,424,538	4,439,424,538	129	15,000,000,000	20,101,830,562	(5,101,830,562)	134
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	15,500,000,000	19,939,424,538	4,439,424,538	129	15,000,000,000	20,101,830,562	(5,101,830,562)	134
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	15,500,000,000	19,939,424,538	4,439,424,538	129	15,000,000,000	20,101,830,562	(5,101,830,562)	134
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	36,841,620,000	23,472,198,008	(13,369,421,992)	64	31,748,430,000	28,582,930,862	3,165,499,138	90
1. Belanja Pegawai	12,305,593,000	12,119,025,183	(186,567,817)	98	12,511,005,000	11,973,780,406	537,224,594	96
2. Belanja Barang	14,635,219,000	6,490,003,528	(8,145,215,472)	44	14,831,562,000	12,264,884,025	2,566,677,975	83
3. Belanja Modal	9,900,808,000	4,863,169,297	(5,037,638,703)	49	4,405,863,000	4,344,266,431	61,596,569	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN 07
SATUAN KERJA : BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA 690805

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:37 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	36,841,620,000	23,472,198,008	(13,369,421,992)	64	31,748,430,000	28,582,930,862	3,165,499,138	90
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

SURABAYA, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AHADI WAHYU HIDAYAT
NIP 197201301992031002